

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN,
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Rokan Hilir)**

**Oleh :
Yuliza**

Pembimbing : Kennedy dan Rheny Afriana Hanif

Faculty of Economic and Business, Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : yuliza@yahoo.co.id

*Influence Of Application Of Government Accounting Standards, Application Of
Regional Financial Accounting System, Utilization Of Information
Technology, And Internal Control System To The Quality Of Local
Government Financial Statements
(Empirical Study On Rokan Hilir Regency)*

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of the application of government accounting standards, the application of regional financial accounting system, the utilization of information technology, and internal control system to the quality of local government financial statements (Empirical Study on OPD of Rokan Hilir Regency). The results showed that the variable application of government accounting standards affect the quality of local financial statements. Furthermore, the variables of the regional financial accounting system have an effect on the quality of regional financial report. Furthermore variables utilization of information technology affect the quality of local financial statements. Furthermore, internal control system variables affect the quality of local financial statements. The results showed that the R Square value of 0.884. The meaning is that the contribution of variable application of government accounting standards, the application of regional financial accounting system, the utilization of information technology and internal control system to the quality of local financial statements is 88.4% While the remaining 11.6% is influenced by other variables not included in the model this research.

Keywords : Application of government accounting standards, the application of regional financial accounting system, the utilization of information technology, internal control system, quality of local financial statements

PENDAHULUAN

Tujuan organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor

swasta. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu perusahaan yang aktivitasnya berhubungan

dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Ulum, 2004:2). Organisasi sektor publik yang sering diidentikkan dengan pemerintahan atau badan usaha yang mayoritas kepemilikannya berada ditangan pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan diberbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, kebebasan beragama dan beberapa hal lainnya.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (SAK, 2009). Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 2009, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi.

Salah satu variabel yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan didefinisikan sebagai kegiatan yang diharuskan oleh pemerintah untuk

menggunakan prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Bastian, 2010:91).

Untuk memenuhi syarat-syarat dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan mempunyai pilihan dua basis, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam lingkungan pemerintahan adalah untuk mengetahui seberapa besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan untuk kepentingan publik, serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual ini dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang bersifat relevan, andal, dapat dibandingkan,

dan dapat dipahami untuk pengambilan suatu keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik.

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah manfaat penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan. Perbedaan penerapan sistem akuntansi pada masa pra reformasi dan sistem yang baru adalah sistem akuntansi penatausahaan keuangan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercermin dalam perhitungan APBD menggunakan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas. Prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas. Hal tersebut tentu saja sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas. Dengan demikian reformasi akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah perubahan single entry menjadi double entry. Single entry pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan tingginya tuntutan perwujudan *good public governance*, perubahan tersebut dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan karena pengaplikasian double entry dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan auditable (Mardiasmo, 2006:26).

Hal lainnya yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi dipandang sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Hal terakhir yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian internal pemerintah itu sendiri. pada Tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP).

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu

mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Rokan Hilir TA 2016. Opini ini sama dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPD Kabupaten Rokan Hilir pada tahun – tahun sebelumnya. Tahun ini Rokan Hilir masih sama dengan tahun lalu dalam hal kualitas keuangannya. BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu pengecualian untuk nilai aset tetap dan nilai penyusutan aset tetap. Hasil ini menunjukkan terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan, banyak data aset yang disajikan tidak jelas akibat sudah lama dan tidak ditemukan catatannya. Opini-opini tersebut diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektifitas Sistem Pengendalian Internal, kepatuhan terhadap peraturan-perundang-undangan serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang memadai. (<http://pekanbaru.bpk.go.id>)

Penelitian merupakan replikasi dari peneliti sebelumnya yaitu Rahman (2015) hanya saja dengan menambahkan satu variable yaitu pengendalian internal serta waktu dan tempat penelitiannya saja yang berbeda. Saran dari penelitian Rahman (2015) untuk menambahkan variabel sistem pengendalian internal

dan perbedaan hasil penelitian inilah yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan pemerintah daerah. Selain itu, dari penelitian yang telah dilakukan, ada penambahan satu faktor yang mungkin memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Latifah (2017) mendapatkan hasil bahwa system akuntansi keuangan daerah dan system pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Setyowati (2016) mendapatkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi, peran audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian yang berbeda tersebut menimbulkan adanya kesenjangan hasil penelitian (*research gap*).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Rokan Hilir)”**

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2) Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3) Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 4) Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi kalau diubah kealam konteks yang memberikan makna.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas

entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, definisi Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. Standar akuntansi pemerintahan dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor.

Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan. Namun, peraturan pemerintah tersebut masih menggunakan basis kas menuju akrual, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 pasal 36 ayat (1) tentang keuangan negara dinyatakan bahwa penerapan basis kas menuju akrual masih bersifat sementara. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun, yang berarti paling lambat tahun 2008. Sejak tahun 2008 pemerintah pun mencanangkan reformasi dibidang akuntansi berupa keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual yang merupakan best practice di dunia internasional pada setiap instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Hasilnya ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pengertian akuntansi sebagaimana dikemukakan oleh *Accounting Principle Board* (APB) yang memandang akuntansi dari sudut fungsinya sebagai berikut : Akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang

bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif tindakan. Akuntansi meliputi beberapa cabang, antara lain akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan akuntansi pemerintahan.

Akuntansi menyediakan informasi yang kuantitatif yang bersifat keuangan, dengan demikian output akuntansi adalah informasi keuangan. Informasi keuangan tersebut lebih dikenal dalam bentuk laporan keuangan. Informasi dari akuntansi keuangan daerah tentu saja digunakan oleh Pemerintah Daerah sendiri (*internal*), juga oleh pihak di luar Pemda (*external*), seperti DPRD, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan

teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global.

Penerapan Teknologi Informasi tidak hanya pada sektor bisnis, tetapi pada sektor publik khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mutlak harus diwujudkan. Sebagai contoh pengajuan perijinan, pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), pembuatan surat ijin mengemudi (SIM) maupun informasi profil daerah. Seperti halnya perusahaan, pemerintah menghadapi masalah dalam penerapan TI.

Sistem Pengendalian Internal

Pengertian sistem pengendalian internal menurut peraturan pemerintah No 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah”.

Seperti telah diuraikan dalam pendahuluan, pengendalian internal didefinisikan merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*). Pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir yang berjumlah 28 OPD. Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari 2018 sampai selesai.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bagian keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Rokan Hilir yang berjumlah 28 OPD.

Sampel dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/keuangan pada OPD Kabupaten Rokan Hilir yang berjumlah 28 OPD. Dari setiap OPD akan diambil 3 responden yaitu Kasubag Keuangan, Bendahara, dan Staf Akuntansi dengan landasan bahwa responden tersebut merupakan yang bertanggung jawab dalam menyusun, merevisi dan melaporkan laporan keuangan kepada pihak terkait. Sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 75 responden.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai “pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah,

pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah” adalah data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2012) definisi data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer diperoleh berdasar dari 75 responden yang berada di OPD Kabupaten Rokan Hilir, dan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih dapat diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap variabel kualitas laporan keuangan.

Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) (Sugiyono, 2012:277).

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Kualitas laporan keuangan

- a = Konstanta
- $b_{1,2,3}$ = Koefisien regresi
- X_1 = Penerapan standar akuntansi pemerintahan
- X_2 = Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah
- X_3 = Pemanfaatan teknologi informasi
- X_3 = Sistem pengendalian internal
- e = *Error term*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk membuktikan apakah hipotesis diterima atau ditolak, maka dilakukan uji regresi linier berganda. Dari pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil koefisien regresi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,215	1,274		1,739	,086
1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	,247	,073	,206	3,387	,001
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,168	,069	,204	2,417	,018
Pemanfaatan Teknologi Informasi	,205	,053	,204	3,897	,000
Sistem Pengendalian Internal	,650	,117	,457	5,544	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : *Data Olahan, 2018*

Berdasarkan hasil analisis regresi di atas, maka persamaan

regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah :

$$Y = 2,215 + 0.247X_1 + 0.168X_2 + 0.205X_3 + 0.650X_4 + e$$

Pengujian Hipotesis Uji t

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji t. hasil uji t dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2
Hasil Uji t

Variabel Independen	Beta	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	Keterangan
X ₁ → Y	0.247	3.387	1.99	0.001	Berpengaruh
X ₂ → Y	0.168	2,417	1.99	0.018	Berpengaruh
X ₃ → Y	0.205	3,897	1.99	0.000	Berpengaruh
X ₄ → Y	0.650	5,544	1.99	0.000	Berpengaruh

Sumber : Data Olahan, 2018

Penjelasan pengujian hipotesis untuk masing-masing variable dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini terangkum pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Regresi Parsial Hipotesis Pertama

Variabel Independen	Beta	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	Keterangan
(X ₁)	0.247	3.387	1.99	0.001	Diterima

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 3.387 dengan signifikansi 0,001 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada

taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan persamaan $n - k - 1$: $0,05 / 2 = 75 - 4 - 1$: $0,05 / 2 = 70$: $0,025 = \pm 1,99$ dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah konstan. Dengan demikian diketahui bahwa t_{hitung} (3.387) > t_{tabel} (1,99) dan Sig (0,001) < 0,05. Jadi dapat dikatakan H₀1 ditolak dan H_a1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan didefinisikan sebagai kegiatan yang diharuskan oleh pemerintah untuk menggunakan prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Bastian, 2010:91).

Suatu pemerintahan yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dalam lingkungan pemerintahan. Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan agar semuanya berjalan dengan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat terutama laporan keuangan yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan untuk dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah harus menerapkan dan mempraktekkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan

laporan keuangan yang berkualitas dalam rangka membentuk suatu tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Riana (2012) dengan judul Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dimana hasil penelitiannya, bahwa dengan penerapan SAP maka akan menjadi pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dalam rangka untuk membentuk suatu tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Penelitian lainnya yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Riana (2014) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh positif terhadap laporan keuangan daerah.

2) Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Hasil pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini terangkum pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Regresi Parsial Hipotesis Kedua

Variabe Independen	Beta	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	Keterangan
X ₂	0.168	2,417	1.99	0.018	Diterima

Sumber : *Data Olahan, 2018*

Dari Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,417 dengan signifikansi 0,018 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan persamaan $n - k - 1: \alpha/2$

$= 75 - 4 - 1: 0,05/ 2 = 70 : 0,025 = \pm 1,99$ dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah konstan. Dengan demikian diketahui bahwa t_{hitung} (2,417) > t_{tabel} (1,99) dan Sig (0,018) < 0,05. Jadi dapat dikatakan H₀ ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah didalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah Sistem Akuntansi. Sebagaimana pengertian dari sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 21 Tahun 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Botutihe (2013) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Gorontalo. Dimana hasil penelitiannya, bahwa dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik maka akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang baik pula atau sebaliknya. Penelitian Kusumah (2012) juga mendukung hasil penelitian ini yang menyatakan

bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

3) Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Hasil pengujian hipotesis ketiga pada penelitian ini terangkum pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Parsial Hipotesis Ketiga

Variabel Independen	Beta	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	Keterangan
X ₃	0.205	3,897	1.99	0.000	Diterima

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 3,897 dengan signifikansi 0,000 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan persamaan $n - k - 1: \alpha/2 = 75 - 4 - 1: 0,05/2 = 70 : 0,025 = \pm 1,99$ dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah konstan. Dengan demikian diketahui bahwa t_{hitung} (3,897) > t_{tabel} (1,99) dan Sig (0,000) < 0,05. Jadi dapat dikatakan H₀1 ditolak dan H_a1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk

menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

4) Hasil Pengujian Hipotesis Keempat

Hasil pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini terangkum pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Parsial Hipotesis Keempat

Variabel Independen	Beta	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	Keterangan
X ₄	0.650	5,544	1.99	0.000	Diterima

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 5,544 dengan signifikansi 0,000 dan diperoleh nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan persamaan $n - k - 1: \alpha/2 = 75 - 4 - 1: 0,05/2 = 70 : 0,025 = \pm 1,99$ dimana n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel bebas dan 1 adalah konstan. Dengan

demikian diketahui bahwa t_{hitung} (5,544) > t_{tabel} (1,99) dan Sig (0,000) < 0,05. Jadi dapat dikatakan H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 pengertian Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakandan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “tidak wajar dan/atau *disclaimer*” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait (Badan Pemeriksa Keuangan, 2011).

Pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan sangat erat kaitannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Faristina (2011) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan BLU dan pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap *timeliness* pelaporan keuangan BLU. Sembiring (2013)

dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Padang. Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara bersama-sama terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kota Padang. Kemudian penelitian yang dilakukan Mailani (2013) mengatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Indriasari dan Nahartyo (2008) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatanwaktuan dan keterandalan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase semua pengaruh variabel independen dan variabel moderating terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besarnya variabel independen dan variabel moderating dapat menjelaskan variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasi maka akan semakin baik variabel independen dan variabel moderating menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian persamaan regresi yang dihasilkan, baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen.

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi
(R²)

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.940 ^a	.884	.878	1,303	1,788

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Data Olahan, 2018

Dari Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,884. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variable penerapan standar akuntansi pemerintahan, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah adalah sebesar 88,4% Sedangkan sisanya 11,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penyajian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Rokan Hilir). Kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan daerah.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel

penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan daerah.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan daerah.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap Kualitas laporan keuangan daerah.

Saran

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu:

1. Perlu dilakukan wawancara yang mungkin dapat membantu dalam mengendalikan jawaban tiap responden.
2. Untuk penelitian selanjutnya agar ruang lingkup diperluas sehingga mungkin saja hasilnya berbeda.
3. Untuk penelitian selanjutnya, perlu menambahkan variabel independen lainnya untuk melihat pengaruhnya terhadap Kualitas laporan keuangan daerah sehingga dapat diketahui bagaimana Kualitas laporan keuangan daerah yang efektif bagi pemerintahan daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang). Program Sarjana UNDIP. Semarang.

- Bastian, Indra. 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi I. (BPFE UGM, Yogyakarta).
- Dicky Rahman, 2015. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). *Jom FEKON* Vol. 2 Nomor. 2 Oktober 2015
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hilton, Perry Roy dan Charlotte Brownlow. 2004. *SPSS Explained*. East Sussex: Routledge.
- Husna, Fadhilah. 2012. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang Panjang). Program Sarjana UNP. Padang.
- Ihyaul Ulum, MD. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Junita Putri Rajana HRP. 2009. Pengaruh Penerapan SAP, Pendidikan, dan Pelatihan terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Pematangsiantar
- Kawedar, W., Rohman, A. dan Handayani, Rr S. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kumorotomo, Wahyu. 2005. Akuntabilitas dalam teori dan praktek. Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa pada masa transisi. Yogyakarta: MAP UGM dan Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nadhirsyah. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). Vol. 3. No. 2. 206-220.
- Partono. 2001. Penyusunan Standar-standar Akuntansi Pemerintah PusaIndonesia. Jakarta : PT. Intama Artha Indonesia.
- Peraturan Pemerintah, 2006. Pelaporan Keuangan dan

- Kinerja Instansi Pemerintah. PP nomor 8 Tahun 2006.
- Peraturan Pemerintah, 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. PP nomor 60 Tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah, 2010. Sistem Akuntansi Pemerintah. PP nomor 71 Tahun 2010
- Rahman, Fajar Aditya. 2012. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Organisasi Perangkat Daerah terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Sensus pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya)" *.Skripsi.Tidak Dipublikasikan.* Fakultas Ekonomi. Universitas Siliwangi.
- Roviyanti, Devi. 2009. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya). Program Sarjana Universitas Siliwangi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004. tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999. tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1999. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004. tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Riyanto, B. 2003. Model Kontijensi Sistem Pengendalian: Integrasi dan Ekstensi untuk Future Research. KOMPAK: Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Sistem Informasi FE UTY Yogyakarta. No: 9. April. 330-342.
- Subaweh, Imam. 2011. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Program Pasca Sarjana Gunadarma. Jakarta.
- Susilawati dan Dwi Seftihani Riana. 2012. Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Anteseden Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah